

BANGSAWAN DAN POLITIK
(STUDI TENTANG KEKUASAAN POLITIK ELITE BANGSAWAN
BUGIS
DALAM TRANSISI DEMOKRASI DI SULAWESI SELATAN)

ANDI TENRI SOMPA

Tesis ini tak lain merupakan usaha untuk memahami fenomena politik elite bangsawan Bugis yang tetap eksis di tengah arus demokratisasi di Indonesia. Elite bangsawan atau elite tradisional merupakan peninggalan masa lampau, di jaman kejayaan kerajaan, yang kemudian di jaman kolonial Belanda maupun Jepang keberadaannya mulai merosot, tetapi fenomena lain muncul pada elite bangsawan Bugis dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Sebagian besar di antara mereka masih mendapatkan pengaruh, peranan dan prestise dari norma dan nilai-nilai adat yang harus diakui belum ditinggalkan oleh masyarakat. Kondisi ini, selanjutnya memberi kontribusi pada perkembangan perpolitikan di Sulawesi selatan. Keabsahan kelompok elite bangsawan Bugis yang ditakdirkan sebagai kelompok pemerintah memiliki legitimasi yang kuat. Era reformasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan demokratisasi dan kebebasan berpolitik ternyata tidak terjadi di Sulawesi Selatan, elite bangsawan Bugis tampaknya masih merupakan kelompok yang mampu bertahan dengan stamina yang cukup kuat bahkan masih sangat disegani dan dihormati di tengah gerusan gelombang demokratisasi yang tiada henti-hentinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan posisi elite bangsawan Bugis dalam struktur sosial saat ini serta proses konversi otoritas tradisional elite bangsawan Bugis dalam melakukan perubahan politik di wilayah publik ditengah maraknya transisi demokrasi di Indonesia dan derasnya arus demokratisasi di dunia ketiga. Di samping itu, penelitian ini juga ingin mendiskripsikan tentang bagaimana elite bangsawan Bugis membangun kontruksi sosial atas realitas politiknya.

memberi kontribusi pada proses sampai akhir studi penulis, Juga kepada Ibunda Suripan terima kasih untuk kasih sayang dan perhatian.

Akhirnya, penulis mengenang dengan penuh khidmad, disertai terima kasih yang mendalam kepada orang tua penulis *Mayor Purn. Andi Tjawa Patombongi* dan *Ibunda Andi Rostiah* juga kepada *Ibunda almarhum ST. Syamsiah* yang tiada henti-hentinya dan dengan penuh kasih sayang mendukung studi penulis, sembah sujudku. Kepada saudara-saudara kakak dan adik-adik penulis, yang dengan penuh sayang membantu dari awal proposal sampai tesis ini rampung menjadi naskah siap uji, sampai pada perolehan gelar Master. Kepada semua pihak yang selalu dan telah memberi semangat, dukungan moril dan materil yang tak dapat penulis nilai dengan apapun juga, terima kasih yang tiada terhingga.

Kepada Allah SWT, penulis memohon kiranya insan-insan yang penulis sebut diatas mendapat pahala dan limpahan Rahmat dari Allah SWT.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didukung oleh data-data yang akurat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari subjek peneliti yang terdiri dari individu-individu atau elite bangsawan Bugis yaitu mereka yang secara garis keturunan atau secara silsilah keturunannya masih memiliki pertalian darah dengan raja-raja etnis Bugis di masa lalu yang secara turun temurun masih dipertahankan sampai saat ini; orang Bugis biasa non bangsawan yaitu mereka yang beretnis Bugis tetapi secara geneologis tidak memiliki pertalian darah dengan raja-raja Bugis, dalam hal ini yang berasal dari golongan *to maradeka* (orang yang meredeka); dan kaum independen yaitu mereka yang berasal dari etnis lain dan etnis pendatang yang menetap dan berinteraksi di Sulawesi selatan. Pengumpulan data diperoleh dari observasi partisipan, wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumentasi, dan kepustakaan yang kemudian dideskripsikan untuk dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa elite bangsawan Bugis melakukan konversi otoritas tradisionalnya dalam melakukan perubahan politik di wilayah publik sebagai antisipasi dalam menghadapi transisi demokrasi melalui pertama, redefinisi kebangsawanan elite bangsawan Bugis yang kemudian menghasilkan *pseudo* bangsawan yang menjadi *free rider* (pembonceng gratis) yang memanfaatkan momen ini. Kedua, untuk mengeksiskan diri dibutuhkan pendidikan formal. Ketiga, melakukan perkawinan politik sebagai manifestasi melapangkan jalan menuju puncak kekuasaan. Keempat, mengupayakan melakukan mobilisasi identitas etnis melalui pembentukan organisasi-organisasi kedaerahan yang akan digunakan sebagai alat legitimasi dan *bargaining position*. Kelima, mempertahankan pola patron-klien sebagai wujud pertahanan otoritas tradisional. Keenam, menciptakan hegemoni baru terhadap etnis lain melalui pendekatan-pendekatan emosional.

Elite bangsawan Bugis dalam mempertahankan dan memperebutkan untuk mendapatkan legitimasi terhadap kekuasaannya melakukan konstruksi sosial dalam memahami dinamika masyarakat yaitu melalui konstruksi tentang politik yang meliputi kekuasaan, legitimasi, wilayah privat-publik, ideologi, kepentingan, negara, politik bangsawan dalam struktur sosial, hubungan elite-

Akhirnya, dalam masa transisi demokrasi di Indonesia, elite bangsawan Bugis di Sulawesi Selatan mampu mensiasati kondisi riil yang kurang berpihak pada kekuasaan tradisional, bahkan kondisi ini menyulut penguatan kekuasaan mereka dan kelompoknya terhadap masyarakat luas. Sadar atau tidak, masyarakat Sulawesi Selatan telah terkooptasi oleh *style of life* dimana *Puang* (gelar kebangsawanan) menjadi simbol artikulasi paling periling bagi hubungan sosial di wilayah kekuasaan elite bangsawan Bugis. Dan simbol kebugisan menjadi prasyarat yang tidak tertulis untuk menjadi elite di Sulawesi Selatan.

ABSTRAC

Noblemen and Politic

(A Study on Politic Elite's Sovereignty of *Bugis* Noblemen in a Democracy Transition in South Sulawesi)

ANDI TENRI SOMPA

This thesis is an effort to understand an elite politic phenomenon of *Bugis* noblemen that exists in the middle of democracy climate in Indonesia. Noblemen elite or traditional elite is one of the remain from our ancestors, in the gold era of kingdoms. Later in colonial Era of the Dutch and Japan, its existence had decreased, however, other phenomena had existed in *Bugis* elite noblemen and the people of South Sulawesi in general. Most of them were influenced, controlled and got prestige from several norms and cultural values that still be maintained by society. Then, this condition contributes to the political development in the South Sulawesi. The legitimacy of *Bugis* elite noblemen groups has been decided to be a government group that has strong legitimacy. The reformation era, which is expected to be able to contribute to the growth of democracy and the freedom in politic cannot be realizable in South Sulawesi since *Bugis* elite noblemen groups have been the strong and honorable groups in the middle of democracy waves.

The objective of this study is to analyze and describe the position of *Bugis* elite noblemen, today's social structure, and the authority conversion process of traditional *Bugis* elite noblemen in implementing political changes in public, in the middle of democracy transitions in Indonesia and in the third World countries.

This study is a field research study supported by accurate data. Data resources in this study are obtained from the researcher's subjects that consist of individuals or *Bugis* elite noblemen who still have descendant relationship with the kings of *Bugis* ethnicity in the past. The people of *Bugis* continually keep this relationship at present. Some *Bugis* people who do not have any genetically relationship with *Bugis* kingdoms come from *to mandeka* group (people who get freedom), independent groups who come from other ethnicities and comers who permanently live and make interaction with the people of South Sulawesi. Data are collected from the observation with participants, in-depth interview, documentation, and literature studys that later be described and analyzed with *qualitative* method.

The results of this study show that *Bugis* elite noblemen implement their traditional authority conversion in performing political changes in society as the anticipation in facing transitions in democracy through : firstly, redefinition of *Bugis* elite noblemen, which results in *pemleu* noblemen who later become *five-raider* and take some benefits from this moment. Secondly, they require formal education in order to be exist in society. Thirdly, by implementing political match as a manifestation in varying ways to reach the top of sovereignty. Fourthly, they try to mobile ethnic identity by establishing regional organizations that will be used as the means of legitimacy and *hargaining position*. Fifthly, they try to maintain *patron-klien* pattern as the manifestation of traditional authority dependency. Sixthly, they create a new hegemony on other ethnicities trough emotional approaches.

Bugis elite noblemen in maintaining legitimacy for their sovereignty, from a social construction to understand society dynamics through construction in politics that includes sovereignty, legitimacy, public-private areas, ideology, interest, state, noblemen politic in social structure, elite-mass relationship, and mass political and democracy participation.

In the end, in democracy transition era in Indonesia, *Bugis* elite noblemen in South Sulawesi are able to anticipate the real condition that is favor less to their traditional sovereignty. Instead, this condition encourages the strengthening of their sovereignty and their groups on wide society. Whether they realize or not, the people of South Sulawesi have been influenced by *style of life* in which *Puang* (a noblemen name) becomes the most important articulation symbol in the social relationship in *Bugis* elite noblemen sovereignty. Then the symbol of *Bugis* becomes an unwritten perquisite to be an elite in South Sulawesi.

Key Words : Political Elite, Traditional Elite, Noblemen, *Bugis*, Sovereignty, Democracy Transition, South Sulawesi.